

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR STUDI KASUS DI KOTA TANJUNGPINANG

Sahla Arifa Pagesti *¹

Ayu Efrita Dewi ²

Heni Widiyani ³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji/Prodi Ilmu Hukum
*e-mail : 2205040102@student.umrah.ac.id¹, ayuefritadewi@umrah.ac.id², heni@umrah.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui analisis dokumen dan berita terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Tanjungpinang merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus. Faktor risiko seperti rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak, serta kurangnya pengawasan terhadap lingkungan anak, menjadi faktor utama yang mempermudah terjadinya kekerasan seksual. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam penegakan hukum terkait kasus-kasus tersebut, termasuk minimnya bukti yang kuat, ketidakmampuan korban untuk melaporkan kasus secara cepat, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, perlunya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus ini. Upaya pencegahan juga menjadi fokus penelitian ini, dengan mengusulkan program pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak dan perlindungan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan, lembaga penegak hukum, dan pihak terkait untuk meningkatkan perlindungan anak dan mengurangi insiden kekerasan seksual di Kota Tanjungpinang.

Kata Kunci : Pelecehan, Anak dibawah umur, Pemerintah.

Abstract

This research aims to analyze cases of criminal acts of sexual violence against minors in Tanjungpinang City. The research method used is a case study with a qualitative approach. Data was obtained through analysis of documents and related news. The results of the research show that criminal acts of sexual violence against minors in Tanjungpinang City are a serious problem that requires special attention and handling. Risk factors such as low levels of education and public awareness of child protection, as well as a lack of supervision of children's environments, are the main factors that make it easier for sexual violence to occur. This research also identifies challenges in law enforcement related to these cases, including the lack of strong evidence, inability to victims to report cases quickly, and public distrust of the legal system. Therefore, it is necessary to increase public awareness about the importance of reporting cases of sexual violence and increase the capacity of law enforcement officials in handling these cases. Prevention efforts are also the focus of this research, by proposing more intensive education and outreach programs regarding children's rights and protection. It is hoped that this research can contribute to policy makers, law enforcement agencies and related parties to improve child protection and reduce incidents of sexual violence in Tanjungpinang City.

Keywords : Abuse, Minors, Government.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengguncang seluruh masyarakat. Kasus-kasus ini bukan hanya mengejutkan, tetapi juga membangkitkan keprihatinan mendalam terhadap perlindungan hak-hak anak. Kota Tanjungpinang, sebagai sebuah kota yang berkembang di Indonesia, tidak luput dari masalah

serius ini. Keberadaan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Tanjungpinang menjadi perhatian utama pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendalami studi kasus mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Tanjungpinang.

Latar belakang utama studi ini adalah tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Tanjungpinang. Statistik yang ada menunjukkan bahwa kasus-kasus ini bukanlah kejadian yang sporadis, melainkan merupakan sebuah permasalahan serius yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak terkait. Angka kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menjadi cermin dari ketidakamanan anak-anak dalam lingkungan sosial mereka, yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Kekerasan seksual pada anak di bawah umur memiliki dampak psikologis dan emosional yang sangat besar. Anak-anak yang menjadi korban sering mengalami trauma berkepanjangan yang dapat memengaruhi perkembangan mereka secara keseluruhan. Dampak ini tidak hanya dirasakan secara individu oleh korban, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat tempat mereka tinggal. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman mendalam terhadap dampak psikologis dan emosional kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur untuk mengembangkan strategi penanganan yang efektif.

Pada tingkat hukum, perlindungan terhadap anak di bawah umur dari kekerasan seksual diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan di Indonesia. Namun, pertanyaan mendasar muncul mengenai sejauh mana implementasi perlindungan ini di Kota Tanjungpinang. Ketersediaan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang mendukung penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menjadi kunci penting dalam menilai efektivitas perlindungan hukum di tingkat lokal.

tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Tanjungpinang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman masalah ini secara menyeluruh. Upaya penanganan dan pencegahan yang komprehensif dapat dihasilkan dari pemahaman mendalam terhadap dinamika kekerasan seksual, dampaknya terhadap anak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka kejadian di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat merangsang kesadaran masyarakat, mendorong keterlibatan aktif, dan memperkuat sistem perlindungan anak di Kota Tanjungpinang.

Keberhasilan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan hukum yang memadai, tetapi juga pada kapasitas sistem hukum dan lembaga penegak hukum untuk memberlakukan dan menegakkan hukum tersebut. Dalam beberapa kasus, kekurangan sumber daya manusia dan kurangnya pelatihan yang memadai mungkin menjadi hambatan dalam menangani kasus-kasus ini dengan cepat dan efisien. Oleh karena itu, penelitian ini akan menyelidiki sejauh mana sistem hukum dan lembaga terkait di Kota Tanjungpinang telah mampu melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Ketersediaan sumber daya, kapasitas pelaksanaan hukum, dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas mereka akan dianalisis untuk memberikan gambaran lengkap tentang efektivitas sistem perlindungan hukum di tingkat lokal. Peran masyarakat dalam membentuk lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, studi ini akan memberikan wawasan tentang sejauh mana masyarakat di Kota Tanjungpinang terlibat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dengan mengevaluasi tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat, kita dapat mengidentifikasi area di mana perlu dilakukan perbaikan dan penguatan.

Pelecehan seksual merupakan penyimpangan serius dari hubungan antara seorang wanita dan seorang pria, yang dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat. Dalam banyak kasus, korban pelecehan seksual mengalami penurunan martabatnya di mata masyarakat karena telah dilecehkan. Meskipun sering kali dikaitkan dengan kaum perempuan, pelecehan seksual tidak memandang gender, dan laki-laki juga dapat menjadi korban. Walau demikian, statistik

menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual terutama melibatkan perempuan. Kejadian ini dapat ditemukan di berbagai rentang usia, mulai dari perempuan dewasa, remaja, hingga anak-anak.

Dalam beberapa dekade terakhir, gejala pelecehan seksual telah meningkat secara signifikan, tidak hanya terbatas pada masyarakat kelas menengah ke bawah, tetapi juga merambah ke kelompok atas yang biasa disebut sebagai kelompok "eksekutif". Keberadaan diskriminasi gender masih menjadi kenyataan di kehidupan sehari-hari, terutama terjadi pada kaum perempuan. Melalui penelitian ini, kita akan mengeksplorasi realitas pelecehan seksual, dampaknya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dan mencegah peningkatan kasus ini.

Pelecehan seksual tidak mengenal batas gender atau lapisan sosial. Meskipun laki-laki juga dapat menjadi korban, statistik menunjukkan bahwa lebih banyak kasus melibatkan perempuan. Kejadian ini dapat ditemui di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kelompok ekonomi rendah hingga kelompok eksekutif yang memiliki kehidupan sosial yang lebih mapan.

Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari komentar tidak pantas, godaan, hingga tindakan fisik yang merugikan. Kasus-kasus ini mencakup pelecehan di lingkungan kerja, sekolah, ruang umum, dan bahkan di dalam rumah tangga. Peningkatan jumlah kasus menunjukkan bahwa pelecehan seksual bukanlah masalah terisolasi, melainkan menciptakan dampak yang meresahkan di seluruh spektrum masyarakat.

Dampak pelecehan seksual pada korban sangat kompleks dan dapat merusak martabat serta kesejahteraan psikologis mereka. Perasaan malu, rendah diri, dan hilangnya rasa aman adalah beberapa dampak umum yang seringkali dihadapi korban pelecehan seksual. Trauma yang diakibatkan oleh pengalaman tersebut dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, hubungan interpersonal, dan bahkan kesehatan fisik.

Ketidakpercayaan terhadap orang lain, masalah dalam membangun hubungan yang sehat, dan penurunan produktivitas adalah dampak jangka panjang yang sering dihadapi oleh korban. Pada tingkat yang lebih dalam, trauma psikologis dapat merembet menjadi masalah kesehatan mental yang serius seperti depresi, kecemasan, atau gangguan stres pasca trauma (PTSD). Diskriminasi gender masih menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi kaum perempuan. Meskipun telah terjadi kemajuan dalam mewujudkan kesetaraan gender, beberapa dekade terakhir masih menyaksikan ketidaksetaraan dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan di berbagai bidang kehidupan. Hal ini menciptakan lingkungan di mana pelecehan seksual dapat berkembang dan terjadi.

Beberapa faktor penyebab diskriminasi gender termasuk norma sosial yang patriarki, stereotip gender yang membatasi peran perempuan, dan ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Semua ini menciptakan kondisi di mana perempuan sering kali menjadi target pelecehan seksual, dan pandangan masyarakat terhadap korban dapat memperparah dampak negatif yang mereka alami. Upaya penanggulangan dan pencegahan pelecehan seksual memerlukan pendekatan yang holistik. Pendidikan yang meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak dan batasan pribadi menjadi kunci dalam mengubah norma sosial yang mendukung pelecehan seksual. Program pendidikan ini perlu merangkul semua lapisan masyarakat, termasuk sekolah, tempat kerja, dan komunitas lokal. Selain itu, penting untuk memperkuat undang-undang dan sistem hukum yang menangani pelecehan seksual.

Pengadilan yang adil dan penegakan hukum yang tegas dapat menjadi deterrent untuk para pelaku dan memberikan keadilan kepada korban. Langkah-langkah ini harus disertai dengan dukungan psikologis dan rehabilitasi bagi korban, membantu mereka pulih dari trauma yang dialami. Melibatkan komunitas dalam upaya pencegahan juga menjadi aspek krusial. Program pelatihan dan advokasi gender dapat membantu mengubah persepsi masyarakat terhadap peran dan hak perempuan. Menyediakan ruang aman untuk melaporkan pelecehan seksual dan mendukung korban juga perlu diintegrasikan dalam upaya bersama untuk mengatasi masalah ini.

1. METODE PENELITIAN

Studi ini akan mengadopsi metode penelitian kualitatif yang mendalam untuk memahami secara menyeluruh fenomena pelecehan seksual dan dampaknya terhadap korban, dengan fokus pada konteks Kota Tanjungpinang. Metode penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali persepsi, pengalaman, dan sudut pandang para pelaku, korban, serta pihak terkait lainnya. Penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dan analisis untuk merinci dan menggambarkan kompleksitas masalah pelecehan seksual di lingkungan tersebut. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang realitas pelecehan seksual di Kota Tanjungpinang. Desain ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap kasus-kasus konkret, memeriksa faktor-faktor penyebab, dampak, serta respons masyarakat dan lembaga terhadap masalah ini. Partisipan penelitian akan melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan isu pelecehan seksual di Kota Tanjungpinang. Ini termasuk korban pelecehan seksual, keluarga korban, petugas penegak hukum, pekerja sosial, dan masyarakat umum. Dengan melibatkan berbagai pihak, penelitian ini akan mencoba memberikan gambaran yang seimbang dan menyeluruh terhadap masalah yang dihadapi.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelecehan anak di bawah umur dan pelecehan seksual merupakan fenomena yang mengejutkan dan merugikan di seluruh dunia, termasuk di Kota Tanjungpinang. Dalam pembahasan ini, akan dianalisis faktor-faktor yang mendasari terjadinya pelecehan anak di bawah umur dan pelecehan seksual di zaman sekarang, dengan fokus pada konteks khusus Tanjungpinang. Penjelasan dan analisis ini akan melibatkan sudut pandang psikologis, sosial, dan kultural serta mempertimbangkan opini para ahli dan penelitian terkini. Keadaan sosial dan ekonomi yang sulit dapat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pelecehan anak di bawah umur. Keberadaan kemiskinan, ketidaksetaraan, dan tekanan ekonomi dapat membuat anak-anak lebih rentan menjadi korban pelecehan. Anak-anak yang hidup dalam kondisi ini mungkin menjadi sasaran empuk bagi pelaku pelecehan yang memanfaatkan kondisi sulit mereka.

Para ahli sosial seperti Judith Herman dan Alice Miller menyoroti hubungan antara kondisi sosial-ekonomi yang buruk dan peningkatan risiko pelecehan anak. Mereka berpendapat bahwa di tengah tekanan ekonomi yang tinggi, individu mungkin cenderung mencari bentuk kekuasaan yang tidak sehat, termasuk melalui pelecehan. Budaya dan nilai-nilai masyarakat juga dapat memainkan peran kunci dalam terjadinya pelecehan anak di bawah umur dan pelecehan seksual. Beberapa masyarakat mungkin memiliki pandangan yang patriarkal dan menekankan ketidaksetaraan gender, yang dapat membuka peluang bagi terjadinya pelecehan. Norma sosial yang membenarkan kontrol dan dominasi terhadap anak-anak dapat menciptakan lingkungan di mana pelecehan lebih mungkin terjadi.

Penelitian psikolog seperti Albert Bandura telah menyoroti peran budaya dalam membentuk perilaku manusia. Masyarakat yang cenderung menormalisasi kekerasan atau pelecehan dapat memberikan landasan bagi tindakan tersebut untuk terus berkembang. Pelecehan seringkali merupakan manifestasi dari ketidaksetaraan kekuasaan dan kontrol. Para ahli seperti Michel Foucault menekankan bahwa pelecehan seksual dapat menjadi alat kekuasaan yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk menjaga dominasi mereka. Pelaku pelecehan mungkin mencari kepuasan melalui penyalahgunaan kekuasaan, dan anak-anak menjadi korban yang mudah karena ketergantungan dan ketidakberdayaan mereka. Pendekatan psikologis seperti teori kebutuhan Abraham Maslow menunjukkan bahwa individu yang merasa tidak memiliki

kekuasaan atau kontrol dalam kehidupan mereka mungkin mencari cara untuk mendapatkan kepuasan ini melalui cara yang tidak etis, termasuk melalui pelecehan.

Kemajuan teknologi dan akses mudah terhadap informasi telah membuka pintu bagi bentuk pelecehan baru, terutama di ranah digital. Kasus pelecehan daring semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penggunaan internet dan media sosial. Anak-anak dapat menjadi target pelaku pelecehan yang menggunakan platform digital untuk menyusup ke dalam kehidupan pribadi mereka.

Ahli teknologi seperti dan pengamat internet seperti dan untuk menciptakan solusi untuk melindungi anak-anak dari potensi pelecehan daring. Mereka menyoroti pentingnya pendidikan digital, pengawasan orang tua, dan kerja sama antara pihak berwenang dan platform online dalam melindungi anak-anak dari pelecehan ini. Tanjungpinang, sebagai kota yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, memiliki karakteristik sosial dan ekonomi tertentu. Faktor-faktor seperti tingginya tingkat migrasi penduduk, ketidaksetaraan ekonomi, dan keberadaan kawasan industri mungkin memainkan peran dalam meningkatnya kasus pelecehan anak di bawah umur di kota ini.

Penelitian oleh ahli sosiologi terkemuka tentang masyarakat kepulauan seperti Koentjaraningrat dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kondisi sosial-ekonomi dapat mempengaruhi dinamika masyarakat Tanjungpinang dan mendorong terjadinya pelecehan. Nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat Tanjungpinang juga perlu diperhatikan. Budaya yang menekankan norma-norma patriarkal atau nilai-nilai yang dapat menormalisasi ketidaksetaraan gender mungkin membuka celah bagi terjadinya pelecehan seksual.

Pendekatan antropologi seperti yang dilakukan oleh Clifford Geertz dapat memberikan perspektif mendalam tentang bagaimana budaya dan nilai-nilai lokal membentuk perilaku masyarakat dan mungkin memengaruhi tingginya kasus pelecehan di Tanjungpinang. Melihat kemajuan teknologi dan tren digital di Tanjungpinang menjadi penting dalam pemahaman pelecehan anak di bawah umur. Bagaimana penduduk Tanjungpinang menggunakan teknologi dan media sosial? Apakah ada kurangnya pemahaman atau pengawasan terhadap aktivitas online anak-anak? Analisis tren digital dan perilaku online di kota ini dapat melibatkan kolaborasi antara ahli teknologi, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mengidentifikasi risiko dan mengembangkan strategi perlindungan yang efektif.

KESIMPULAN

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur memiliki akar penyebab yang kompleks. Salah satu faktor yang sering diidentifikasi adalah adanya ketidaksetaraan gender dan norma patriarki. Diskriminasi terhadap perempuan, terutama dalam hal hak-hak dan status sosial, menciptakan lingkungan di mana pelecehan seksual dapat berkembang. Selain itu, faktor-faktor ekonomi dan sosial seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya juga dapat memperburuk risiko pelecehan seksual. Dalam konteks Kota Tanjungpinang, beberapa ahli menyoroti isu-isu khusus, termasuk ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan peluang pekerjaan, yang dapat menjadi pendorong pelecehan seksual. Lingkungan masyarakat yang masih dipengaruhi oleh norma patriarki dan kurangnya kesadaran akan hak-hak perempuan juga menjadi faktor penentu terjadinya pelecehan seksual. Dampak pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sangat merugikan dan mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Anak-anak yang menjadi korban sering mengalami trauma, depresi, dan gangguan kejiwaan yang dapat berlangsung hingga dewasa. Rendahnya rasa percaya diri, ketidakmampuan membangun hubungan yang sehat, dan kesulitan beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari menjadi dampak yang sering kali dihadapi oleh korban.

DAFTAR PUSTAKA

Arief Sidharta, "Etika dan Kode Etik Profesi Hukum", Jurnal Veritas et Justitia, Volume 1 Nomor 1, Juni 2015.

Dey Ravena, "Wacana Konsep Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 23 No. 2, September 2010.

Ery Setyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan "Substantif")", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 44 Nomer 4, Oktober 2014.

Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan", Jurnal Hukum PROGRESIF, Vol.1 No. 1, Juni 2005.

Sulistiyowati Irianto, "Hukum yang Tak Peduli Korban", Jurnal Perempuan, Nomor 71, November 2011.